



**RANCANGAN AWAL
RENCANA KERJA
TAHUN 2023**

(RENJA)

DINAS TENAGA KERJA
KOTA PONTIANAK

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala Limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini dilakukan sebagai acuan bagi Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak Tahun 2023 ini disusun sebagai rencana pelaksanaan kegiatan yang merupakan implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Pontianak Tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak Tahun 2020-2024, yang di dalamnya tertuang Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan yang dapat dipergunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) yang selanjutnya di tetapkan ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023.

Menyadari pentingnya Rencana Kerja (RENJA) Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak Tahun 2023 ini sebagai dasar pelaksanaan kegiatan, maka penyusunannya senantiasa melibatkan unit-unit pelaksanaan seperti : Sekretaris, Kabid, Kasubbag / Kasubbid di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak guna mendapat masukan-masukan yang

diharapkan demi tercapainya efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Program dan Kegiatan.

Demikian Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak terutama seluruh unit yang tergabung dalam Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak untuk memperoleh kinerja yang baik pada periode berikutnya. Selanjutnya, Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak akan terus berupaya untuk berkarya dengan lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Pontianak, 2022

Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kota Pontianak

TINORMA BUTAR-BUTAR, SH

Pembina Tk. I

NIP. 19640926 199403 2 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i	
DAFTAR ISI	iii	
DAFTAR TABEL	iv	
BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Landasan Hukum	2
1.3	Maksud dan Tujuan	8
1.4	Sistematika Penulisan	8
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA OPD TAHUN LALU	9
2.1	Evaluasi Pelaksanaan RENJA OPD Tahun Lalu Dan Capaian Renstra OPD	9
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan OPD	23
2.3	Isu-Isu Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi OPD	27
2.3.1	Permasalahan Dan Hambatan Dalam Menyelenggarakan Tugas Dan Fungsi OPD.....	29
2.3.2	Dampak Terhadap Pencapaian Visi Dan Misi Kepala Daerah, Terhadap Capaian Program Nasional/International Seperti SPM Dan MDGS (Millenium Development Goals)	29
2.3.3	Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan.....	31
2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	33
2.5	Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat	34
BAB III	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	41
3.1	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	41
3.2	Tujuan dan Sasaran RENJA OPD	42
3.2.1	Tujuan.....	42
3.2.2	Sasaran.....	43
3.3	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	44

BAB IV	Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Tenaga Kerja	56
	Rencana Kerja	56
	Pendanaan.....	56
BAB IV	PENUTUP	57

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2022	26
Tabel 2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak	28
Tabel 3	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023	39

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023 merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang selanjutnya dijabarkan pada Rencana Kerja untuk periode satu (satu) tahun untuk mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi OPD.

Rencana Kerja (Renja) OPD merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dalam prosesnya penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD yang mengacu pada RPJM.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak, diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman dalam menyusun kegiatan setiap tahunnya.

Hubungan RENJA dengan dokumen lainnya adalah sebagai berikut:

1. Renstra DPMTKPTSP Kota Pontianak mengacu pada RPJMD Kota Pontianak dan RPJMD Provinsi Kal-Bar.
2. Renstra DPMTKPTSP menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya.
3. Rencana Kerja (Renja) DPMTKPTSP dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dalam RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 833);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
22. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Nasional Tahun 2015-2019;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);

26. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kota Pontianak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9);
27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 Nomor 5);
28. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117);
29. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 49);
30. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 8);
31. Peraturan Daerah Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023;
32. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 39 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
33. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 96 Tahun 2020 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak;

34. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 89 Tahun 2020 tentang Standar Operasional Prosedur pada Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
35. Keputusan Walikota Pontianak Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak;
36. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
37. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
38. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
40. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024;
41. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak dimaksudkan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dalam RAPBD yang memuat program dan kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan kegiatan pelayanan perizinan dan perencanaan modal untuk 1 (satu) tahun ke depan.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak:

1. Menterjemahkan visi, misi dan program pembangunan dalam RPJMD Kota Pontianak secara nyata ke dalam visi, misi, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi.
2. Mewujudkan perencanaan dan penganggaran terpadu yang berbasis hasil/kinerja.
3. Menciptakan mekanisme pelaksanaan program dan kegiatan yang fokus, tidak tumpang tindih dan terintegrasi.
4. Membangun sistem penilaian kinerja yang terukur, transparan dan akuntabel.
5. Menciptakan mekanisme pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang perizinan teknis dan penanaman modal.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RENJA pada Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak adalah sebagai berikut:

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Evaluasi dan analisis capaian kinerja ditujukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan serta hambatan kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah pemecahan masalah yang diambil instansi dalam rangka memenuhi target kinerja dari masing-masing indikator kinerja sasaran (Outcome) dan indikator kinerja kegiatan (Output) yang ingin dicapai dan dilaksanakan pada tahun anggaran 2023. Selain itu disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai input bagi proses pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Evaluasi dan analisis capaian kinerja disajikan secara sistematis berdasarkan format pengukuran kinerja yaitu, dengan terlebih dahulu menyajikan hasil pengukuran terhadap capaian kinerja sasaran strategis beserta indikator kinerja sasaran, target dan realisasinya dan selanjutnya dilanjutkan dengan hasil pengukuran kinerja kegiatan beserta indikator kinerja subkegiatan, target dan realisasinya, dan realisasi anggarannya.

Berdasarkan hasil pengukuran dengan menggunakan pendekatan diatas, berikut dikemukakan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran dan kegiatan serta anggaran pada Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak Tahun 2021.

Tabel 2.1.
Perbandingan Realisasi Serta Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Tahun 2021

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
1	IKM terhadap pelayanan DPMTKPTSP	Baik (88,30)		100,14%
2	Persentase Peningkatan Investasi Daerah (PMA/PMDN)	5%		80,80%
3	Rasio penduduk Yang Bekerja	89,30 – 89,98%		100,93%
4	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian bersama (PB)	52%		118,37%
5	Besaran pekerja atau buruh yang menjadi peserta aktif BPJS ketenagakerjaan	68%		45,61%

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak

Evaluasi dan Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama, pada masing-masing Indikator sebagai berikut:

1). IKM terhadap pelayanan DPMTKPTSP

Dari tabel 2.1 diatas, terlihat bahwa target pada indikator kinerja utama pada sasaran IKM terhadap pelayanan DPMTKPTSP dengan target kategori Baik (88,30) dimana realisasi indikatornya dengan kategori sangat baik (88,43). Dapat dilihat bahwa pada tahun 2021 realisasi melebihi target yang sudah ditentukan. Dengan demikian dapat disimpulkan Capaian Indikator Kinerja Utama IKM terhadap pelayanan DPMTKPTSP masuk pada katagori "*Sangat Berhasil*".

2). Persentase Peningkatan Investasi Daerah (PMA/PMDN)

Dari tabel 2.1 diatas, terlihat bahwa untuk tahun 2021 dengan target 5% realisasi sebesar 4,04%. Simpulan capaian indikator kinerja Persentase Peningkatan Investasi Daerah (PMA/PMDN) masuk pada kategori "*Berhasil*".

3). Rasio penduduk yang bekerja

Dari tabel 2.1 diatas, terlihat bahwa target pada indikator kinerja utamapada sasaran rasio penduduk yang bekerja dengan target 90,03%, dimana realisasi indikatornya sebesar 90,87%. Dapat disimpulkan bahwa capaian Indikator rasio penduduk yang bekerja masuk pada katagori "*Sangat Berhasil*".

4). Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian bersama (PB)

Dari tabel 2.1 diatas, terlihat bahwa target pada indikator kinerja utama pada sasaran besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian bersama (PB) dengan target 50,22%, dimana realisasi indikatornya di tahun 2021 sebesar 59,45%. Pada tahun 2021 realisasi melebihi target yang sudah ditentukan. Dengan demikian dapat disimpulkan Capaian Indikator Kinerja Utama IKM terhadap pelayanan DPMTKPTSP masuk pada katagori "*Sangat Berhasil*".

5). Besaran pekerja atau buruh yang menjadi peserta aktif BPJS ketenagakerjaan

Dari tabel 2.1 diatas, terlihat bahwa target pada indikator kinerja utama pada sasaran besaran pekerja atau buruh yang menjadi peserta aktif BPJS ketenagakerjaan dengan target 62%, dimana realisasi indikatornya sebesar 28,28%. Pada indikator ini realisasi tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Dapat disimpulkan bahwa capaian Indikator besaran pekerja atau buruh yang menjadi peserta aktif BPJS ketenagakerjaan masuk pada kategori "*Tidak Berhasil*".

Adapun Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, dapat dilihat pada tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2

**Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian
Pernyataan Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak
Tahun 2021**

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2021	ANALISA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	PENJELASANAN GAGAL/ BERHASIL
1	IKM terhadap pelayanan DPMTKPTSP	<p>Program Terdiri dari:</p> <p>1. Program Pelayanan Penanaman Modal. Capaian Indikator Program :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Terselenggaranya evaluasi mekanisme, prosedur dan penerbitan perizinan. ➤ Terselenggaranya fasilitasi teknis IMB pemutihan. ➤ Persentase Penagihan Piutang Retribusi Perizinan Tertentu (IMB). 	<p>12 kali</p> <p>155 berkas</p> <p>Rp. 2.339.467.737</p>	<p>12 kali</p> <p>75 berkas</p> <p>Rp.883.468.600</p>	<p>100%</p> <p>48,38%</p> <p>37,76%</p>	<p>Realisasi indikator kegiatan sebanyak 12 kali sama dengan target yang telah ditetapkan yaitu 12 kali. Analisa capaian indikator kinerja sebesar 100%. Indikator kinerja masuk pada kategori Sangat Behasil.</p> <p>Realisasi indikator kegiatan sebanyak 75 berkas lebih kecil dari target yang telah ditetapkan yaitu 155 berkas. Analisa capaian indikator kinerja sebesar 48,38%. Indikator kinerja masuk pada kategori Tidak Behasil. Kegiatan ini tidak memenuhi target karena kegiatan yang seharusnya dilaksanakan 8 kali hanya dapat terealisasi sebanyak 6 kali. Pelaksanaan kegiatan dibatalkan sebanyak 2 kali kegiatan dalam rentang waktu bulan Maret hingga April 2020 diakibatkan pandemi covid 19.</p> <p>Realisasi indikator kegiatan Rp.883.468.600 lebih kecil dari target yang telah ditetapkan yaitu Rp. 2.339.467.737. Analisa capaian indikator kinerja sebesar 37,76%. Indikator kinerja masuk pada kategori Tidak Behasil. Kegiatan ini tidak memenuhi target karena pandemi covid 19 sehingga kegiatan turun lapangan diminimalisir. Selain itu animo masyarakat dalam membayar tagihan retribusi IMB cukup tinggi sehingga piutang yang ada sudah terlebih dahulu dilunasi sebelum dilakukan penagihan. Sementara piutang yang dapat ditagih adalah piutang macet dalam kurun waktu 2-3 tahun sebelumnya (tidak</p>

		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Terselenggaranya Koordinasi teknis perizinan 	30 berkas	50 berkas	166,66%	<p>membayar dengan alasan yang sama setiap kali dilakukan penagihan) yang selanjutnya akan dimasukkan dalam daftar penghapusan piutang.</p> <p>Realisasi indikator kegiatan sebanyak 50 berkas sehingga melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 30 berkas. Analisa capaian indikator kinerja sebesar 100%. Indikator kinerja masuk pada kategori Sangat Behasil.</p>
		<p>2. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan</p> <p>Capaian Indikator Program :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Terlaksananya Peningkatan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan terpadu 	3 paket	3 paket	100%	<p>Realisasi indikator kegiatan sebanyak 3 paket sama dengan target yang telah ditetapkan yaitu 3 paket. Analisa capaian indikator kinerja sebesar 100%. Indikator kinerja masuk pada kategori Sangat Behasil.</p>
		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu 	1 aplikasi	1 aplikasi	100%	<p>Realisasi indikator kegiatan sebanyak 1 aplikasi sama dengan target yang telah ditetapkan yaitu 1 aplikasi. Analisa capaian indikator kinerja sebesar 100%. Indikator kinerja masuk pada kategori Sangat Behasil.</p>
2	Persentase Peningkatan Investasi Daerah (PMA/PMDN)	<p>Program Terdiri dari:</p> <p>1. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.</p> <p>Capaian Indikator Program:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal, Perizinan dan Pengaduan Masyarakat. ➤ Fasilitasi Penanaman Modal Bidang Non Perizinan ➤ Monitoring dan Evaluasi Sektor Sarana dan Prasarana 	5 pengaduan	6 pengaduan	120%	<p>Realisasi indikator kegiatan sebanyak 6 pengaduan melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 5 pengaduan. Analisa capaian indikator kinerja sebesar 120%. Indikator kinerja masuk pada kategori Sangat Behasil.</p>
			40 izin	36 izin	90%	<p>Realisasi indikator kegiatan sebanyak 36 izin lebih kecil dari target yang telah ditetapkan yaitu 40 izin. Analisa capaian indikator kinerja sebesar 90%. Indikator kinerja masuk pada kategori Sangat Behasil.</p>
			240 perusahaan	240 perusahaan	100%	<p>Realisasi indikator kegiatan sebanyak 240 perusahaan sama dengan target yang telah ditetapkan yaitu 240 perusahaan. Analisa capaian indikator kinerja sebesar 100%. Indikator kinerja masuk pada kategori Sangat Behasil.</p>

		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Monitoring dan Evaluasi Sektor Ekonomi 	300 perusahaan	300 perusahaan	100%	Realisasi indikator kegiatan sebanyak 300 perusahaan sama dengan target yang telah ditetapkan yaitu 300 perusahaan. Analisa capaian indikator kinerja sebesar 100%. Indikator kinerja masuk pada kategori Sangat Behasil.
		<p>2. Program Kebijakan Penanaman Modal</p> <p>Capaian Indikator Program:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Evaluasi Kebijakan dan regulasi Perizinan dan Penanaman Modal 	3 dokumen	4 dokumen	133,33%	Realisasi indikator kegiatan sebanyak 4 dokumen melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 3 dokumen. Analisa capaian indikator kinerja sebesar 133,33%. Indikator kinerja masuk pada kategori Sangat Behasil.
		<p>3. Program Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal</p> <p>Capaian Indikator Program :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Bimbingan dan Pelatihan Pelaksanaan Penanaman Modal Kepada Masyarakat Dunia usaha 	80 orang	20 orang	25%	Realisasi indikator kegiatan sebanyak 20 orang lebih kecil dari target yang telah ditetapkan yaitu 80 orang. Analisa capaian indikator kinerja sebesar 25%. Indikator kinerja masuk pada kategori Tidak Behasil. Kegiatan ini tidak memenuhi target karena pandemi covid 19 sehingga untuk menerapkan protokol kesehatan peserta dibatasi hanya 20 orang saja agar tidak menimbulkan kerumunan.
3	Rasio penduduk Yang Bekerja	<p>Program Terdiri dari:</p> <p>1. Program Peningkatan Kesempatan Kerja.</p> <p>Capaian Indikator Program:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pelaksanaan Bursa Tenaga Kerja (job fair). 	1 kali	1 kali	100%	Realisasi indikator kegiatan sebanyak 1 dokumen sama dengan target yang telah ditetapkan yaitu 1 dokumen. Analisa capaian indikator kinerja sebesar 100%. Indikator kinerja masuk pada kategori Sangat Behasil.
		<p>2. Program peningkatan Kualitas dan produktivitas tenaga Kerja</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pelatihan Kewirausahaan. 	30 orang	30 orang		Sudah dilaksanakan seleksi tertulis dan wawancara kepada 45 calon peserta hingga terjaring 30 peserta. Namun karena pandemi covid 19 yang tidak memperkenankan adanya konsentrasi masa dalam jumlah banyak dan tidak menimbulkan kerumunan maka kegiatan ini tidak dilanjutkan pelaksanaannya/dibatalkan.
4	Besaran kasus yang diselesaikan dengan	<p>Program Terdiri dari:</p> <p>1. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.</p>				

	Perjanjian bersama (PB).	<p>Capaian Indikator Program:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Fasilitasi Lembaga Kerjasama Tripatrit ➢ Pembahasan dan Penyusunan Upah Minimum Kota Pontianak ➢ Penyebarluasan Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan 	3 kali	2 kali	66,66%	Realisasi indikator kegiatan sebanyak 2 kali sehingga lebih kecil target yang telah ditetapkan yaitu 3 kali. Analisa capaian indikator kinerja sebesar 66,66%. Indikator kinerja masuk pada kategori Cukup Behasil. Pelaksanaan tidak sesuai target karena terjadi perubahan anggaran honorarium anggota dari 18 orang menjadi 15 orang sehingga kegiatan ini hanya dapat dilaksanakan 2 kali.
			1 dokumen	1 dokumen	100%	Realisasi indikator kegiatan sebanyak 1 dokumen sama dengan target yang telah ditetapkan yaitu 1 dokumen. Analisa capaian indikator kinerja sebesar 100%. Indikator kinerja masuk pada kategori Sangat Behasil.
			4 kali	4 kali	100%	Realisasi indikator kegiatan sebanyak 4 kali sama dengan target yang telah ditetapkan yaitu 4 kali. Analisa capaian indikator kinerja sebesar 100%. Indikator kinerja masuk pada kategori Sangat Berhasil.
5	Besaran pekerja atau buruh yang menjadi peserta aktif BPJS ketenagakerjaan	<p>Program Terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Jaminan Sosial Bagi Pekerja/Buruh. <p>Capaian Indikator Program :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Peningkatan kepesertaan Kesejahteraan bagi Tenaga Kerja 	3 kali	1 kali	33,33%	Realisasi indikator kegiatan sebanyak 1 kali sehingga lebih kecil dari target yang telah ditetapkan yaitu 3 kali. Analisa capaian indikator kinerja sebesar 33,33%. Indikator kinerja masuk pada kategori Tidak Behasil. Kegiatan ini tidak memenuhi target karena pandemi covid 19 sehingga agar tidak menimbulkan kerumunan maka kegiatan hanya dilaksanakan 1 kali. Selain itu terdapat pemangkasan anggaran sebesar 50% yang dapat digunakan untuk 1 kali kegiatan.

Sasaran Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak Tahun 2020-2024, terdapat 4 (Empat) sasaran strategis dan 5 (lima) indikator kinerja sasaran yang harus di capai. Adapun sasaran strategis dan indikator kinerja pada pelaksanaan anggaran tahun 2023 berdasarkan renstra OPD adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Capaian Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Capaian Tahun 2023
1	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan non perizinan dan penanaman modal	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap pelayanan DMPTKPTSP	Sangat Baik
2	Meningkatnya investasi daerah	Persentase peningkatan investasi daerah (PMA/PMDN	6 %
3	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja yang optimal	Rasio penduduk yang bekerja	91,50%
4	Terciptanya hubungan industrial yang harmonis	Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)	54,20%
		Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan	74 %

Sumber : Data Perencanaan DPMTKPTSP Tahun 2021

Penjelasan tabel 2.3 diatas kemudian dijabarkan capaian masing-masing kinerja program dan kegiatan tersebut dapat diuraikan secara rinci sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Penanaman Modal

- a. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota

Capaian kinerja kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kotaditargetkan 100%.

- a) Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Capaian kinerja Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik ditargetkan 1100 Berkas

- b) Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal

Capaian kinerja Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal ditargetkan 190 Perusahaan/Berkas

- c) Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan

Capaian kinerja Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan ditargetkan 5 Pengaduan

- d) Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah

Capaian kinerja Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah ditargetkan Rp. 2.579.263.180,00

2. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
 - a. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi pada tingkat Daerah Kota Pontianak
Capaian kinerja kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang terintegrasi pada Tingkat Daerah Kota Pontianak ditargetkan 100%.
 - a) Capaian kinerja Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik ditargetkan selama 12 bulan
3. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
 - a. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kota
Capaian kinerja kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kotaditargetkan 12 kali.
 - a) Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
Capaian kinerja Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal ditargetkan selama 12 bulan
 - b) Koordinasi dan sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan penanaman modal
Capaian kinerja Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan penanaman modal ditargetkan 240 Peserta
 - c) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

Capaian kinerja Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal ditargetkan 69 Kali

4. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

a. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota

Capaian kinerja kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kota ditargetkan 3 Dokumen.

a) Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Intensif dan kemudahan penanaman modal
Capaian kinerja Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Intensif dan kemudahan penanaman modal ditargetkan 3 Dokumen

b) Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
Capaian kinerja Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal ditargetkan 12 Kali

b. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kota

Capaian kinerja kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kota ditargetkan 1 Dokumen.

a) Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota
Capaian kinerja Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota ditargetkan 1 Dokumen

5. Program Promosi Penanaman Modal

a. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kota

Capaian kinerja kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kota ditargetkan 1 kegiatan.

a) Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota Capaian kinerja Sub kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota ditargetkan 1 Kegiatan.

6. Program Penempatan Tenaga Kerja

a. Pelayanan Antar Kerja di daerah Kabupaten/ Kota

Capaian kinerja kegiatan Pelayanan Antar Kerja di daerah Kabupaten/ Kota ditargetkan 4 Kali

a) Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja
Capaian kinerja Sub kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja ditargetkan 90 Orang

b. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja

Capaian kinerja kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja ditargetkan 100%

a) Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online

Capaian kinerja Sub kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online ditargetkan 100 Perusahaan

b) Job Fair/ Bursa Kerja

Capaian kinerja Sub kegiatan Job Fair/ Bursa Kerja ditargetkan 1100 Lowongan

7. Program Pelatihan Kerja Dan Produktifitas Tenaga Kerja

a. Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi

Capaian kinerja kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi ditargetkan 2 Kali

- a) Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
Capaian kinerja Sub kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi ditargetkan 60 Peserta
 - b. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
Capaian kinerja kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta ditargetkan 80 Lembaga
 - a) Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
Capaian kinerja Sub kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta ditargetkan 65 lembaga
8. Program Hubungan Industrial
- a. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Kota Pontianak
Capaian kinerja kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Kota Pontianak ditargetkan 3 Kali
 - a) Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/ berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Capaian kinerja Sub kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/ berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota ditargetkan 70 Peserta
 - b) Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Kota

Capaian kinerja Sub kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Kota ditargetkan 12 Kali

- b. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota

Capaian kinerja kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota ditargetkan 10 Kali

- a) Pengesahan Peraturan Perusahaan Bagi Perusahaan

Capaian kinerja Sub kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan Bagi Perusahaan ditargetkan 4 Kali

- b) Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan

Capaian kinerja Sub kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan ditargetkan 60 Perusahaan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan DPMTKPTSP

Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak merupakan DPMTKPTSP penyelenggara pelayanan perizinan secara terpadu dengan komitmen pelayanan prima sesuai dengan prinsip mudah, cepat, transparan dan akuntabel.

Berdasarkan Keputusan Walikota Pontianak Nomor 603/DPMTKPTSP/Tahun 2019 tentang perubahan atas keputusan Walikota Nomor 843/DPMTKPTSP/Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melayani jenis pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan secara terpadu yaitu:

1. Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Investasi (PI).
2. Pelayanan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
3. Pelayanan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal.
4. Pelayanan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Pelatihan Kerja.
5. Pelayanan Penerbitan Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
6. Izin Pembuangan Limbah Cair.
7. Pelayanan Pemenuhan Komitmen Online Single Submission.
8. Pelayanan Penerbitan / Rekomendasi Pendahuluan Walikota.
9. Pelayanan Penanganan Pengaduan Perizinan.
10. Pelayanan Penerbitan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL).
11. Pelayanan penerbitan dan perpanjangan Kartu Angkatan Kerja (AK.1).
12. Pelayanan Surat Persetujuan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL).

13. Pelayanan Pengajuan Permohonan Keringanan Retribusi Perizinan Tertentu.
14. Pelayanan penerbitan rekomendasi pembukaan dan perpanjangan kantor cabang pelaksana penempatan tenaga kerja indonesia swasta (PPTKIS).
15. Pelayanan Penerbitan surat pengantar pembuatan paspor calon tenaga kerja Indonesia.

Kemudian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak juga melayani jenis pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan secara Online Single Submission, yaitu:

1. Pelayanan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
2. Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Industri (TDI) / Izin Usaha Industri (IUI).
3. Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK).
4. Pelayanan Penerbitan Izin Trayek.
5. Pelayanan Penerbitan Surat Izin Usaha Angkutan Umum (IUA).
6. Pelayanan Penerbitan Izin Fasilitasi Pelayanan Kesehatan.
7. Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan.
8. Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK).
9. Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
10. Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Gudang (TDG).
11. Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP).
12. Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional.
13. Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Pusat Perbelanjaan.
14. Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Toko Modern (IUTM).
15. Pelayanan Penerbitan Izin Lingkungan.

Untuk melaksanakan administrasi perizinan tersebut, Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak memiliki Sistem Pelayanan Terpadu (SIMYANDU) dan mengolah Sistem Online Single Submission (OSS).

Kinerja pelayanan DPMTKPTSP Kota Pontianak secara keseluruhan sesuai dengan sasaran di dalam perencanaan strategis Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak Tahun 2020-2024 adalah :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan penanaman modal

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator :

- a). Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2. Terwujudnya investasi yang efektif dan efisien

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator :

- a). Persentase Peningkatan Investasi Daerah (PMA/PMDN)

3. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja yang optimal

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator :

- a). Rasio Penduduk Yang Bekerja

4. Terciptanya hubungan industrial yang harmonis

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator :

- a) Besaran Kasus Yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)

- b) Besaran Pekerja/Buruh yang menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan

Pencapaian kinerja tersebut dapat dilihat persentasenya pada tabel 2.5 berikut ini.

2.3. Isu – Isu Tentang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMTKPTSP

Tujuan utama dari pelayanan publik adalah kepuasan masyarakat selaku konsumen penikmat layanan. Untuk itu isu strategis pelayanan publik adalah meningkatkan kualitas layanan sehingga mencapai level kepuasan masyarakat. Untuk dapat mencapai level tersebut diperlukan berbagai perbaikan yang keterkaitannya dengan pelaksanaan reformasi birokrasi. DPMTKPTSP Kota Pontianak telah melakukan berbagai terobosan dalam rangka perbaikan layanan publik seperti penyederhanaan jumlah dan mekanisme perizinan, penyusunan SOP pada setiap jenis layanan perizinan serta peningkatan profesional aparatur. Akan tetapi hal tersebut belum cukup memberikan kepuasan kepada masyarakat, sehingga diperlukan berbagai inovasi selain hal-hal konvensional yang telah dilakukan. Hal yang perlu juga mendapatkan perhatian dalam peningkatan pelayanan publik ini adalah penciptaan sistem pelayanan yang efisien yang tidak memberikan peluang terjadinya penyelewengan/penyalahgunaan wewenang.

Organisasi Perangkat Daerah (DPMTKPTSP) yang disertai tugas menyelenggarakan pelayanan perizinan terpadu di Kota Pontianak adalah DPMTKPTSP Kota Pontianak, dimana Dinas ini dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 96 Tahun 2020 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak.

Dalam kurun waktu 9 (sembilan) tahun (1999-2008), Pemerintah Kota Pontianak telah beberapa kali mengubah nomenklatur kelembagaan pelayanan perizinan terpadu, yaitu :

1. Unit Pelayanan Perizinan Terpadu (UP2T). Dibentuk berdasarkan Keputusan Walikotamadya KDH Tingkat II Pontianak Nomor 16 Tahun 1999. Ada 8 jenis izin yang dilayani.
2. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T). Dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002. Ada 9 jenis izin yang dilayani.
3. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah (KP2T & PMD). Dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004. Melayani 9 jenis izin.
4. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T). Dibentuk berdasarkan Perda Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak. Melayani 99 jenis izin. Kemudian melalui Peraturan Walikota Pontianak Nomor 55 tahun 2011 disederhanakan menjadi 29 jenis izin yang dilayani. Kemudian disederhanakan kembali menjadi 18 jenis izin dengan Perwa Nomor 14 Tahun 2014.
5. Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak. Dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 62 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak. Kemudian dengan Peraturan Walikota Pontianak nomor 89 Tahun 2020 Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melayani 7 jenis perizinan dan 8 non-perizinan.

Perubahan kelembagaan sebanyak 5 kali tersebut merupakan salah satu upaya Pemerintah Kota menyikapi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di Kota Pontianak. Dengan melihat perkembangan yang ada saat ini, DPMTKPTSP Kota Pontianak perlu melakukan perubahan kelembagaan sebagai bentuk menyikapi kebutuhan masyarakat, perkembangan kota, pertumbuhan ekonomi dan perubahan peraturan. Perubahan kelembagaan tersebut untuk menyikapi perubahan peraturan bahwa penanaman modal merupakan urusan wajib pemerintah daerah.

2.3.1. Permasalahan dan hambatan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi DPMTKPTSP

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan perizinandan ketenagakerjaan di Kota Pontianak adalah sebagai berikut :

1. Pemahaman personil tentang SPM di bidang tenaga kerja yang masih sangat terbatas;
2. Pelaksanaan sistem database penanaman modal belum optimal;
3. Peningkatan mutu dan produktivitas tenaga kerja melalui pendidikan dan keterampilan belum maksimal;
4. Terbatasnya perluasan lapangan kerja menyebabkan belum maksimalnya penyerapan tenaga kerja yang ada.

2.3.2. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional / internasional seperti SPM dan MDGS (Millenium Development Goals)

A. Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Berdasarkan kondisi Kota Pontianak, maka tantangan yang dihadapi lima tahun mendatang dan

mengacu pada amanat RPJM Provinsi Kalimantan Barat, maka visi pembangunan Kepala Daerah adalah :

“PONTIANAK KOTA KHATULISTIWA, BERWAWASAN LINGKUNGAN, CERDAS DAN BERMARTABAT”

B. Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Sesuai dengan visi “Pontianak kota khatulistiwa, berwawasan lingkungan, Cerdas dan Bermartabat”, maka telah ditetapkan misi pembangunan Kota Pontianak tahun 2020 – 2024, yang disusun dalam rangka mewujudkan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Adapun misi yang telah ditetapkan berdasarkan visi sebagaimana tersebut di atas adalah sebagai berikut :

Misi 1 : Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya.

Menciptakan infrastruktur perkotaan yang

Misi 2 : berkualitas dan representatif.

Meningkatkan kualitas pelayanan kepada

Misi 3 : masyarakat yang didukung dengan teknologi informasi serta aparatur yang berintegritas, bersih dan cerdas.

Misi 4 : Mewujudkan masyarakat sejahtera yang mandiri, kreatif dan berdaya saing.

Misi 5 : Mewujudkan kota yang bersih, hijau, aman, tertib, dan berkelanjutan

Mengacu pada misi ke 4 (empat) tersebut diatas, maka ada beberapa faktor pendorong yang sangat dimungkinkan untuk pencapaian misi tersebut melalui visi dan misi yang ditetapkan oleh DPMTKPTSP Kota Pontianak yaitu :

1. Kota Pontianak adalah sebagai pusat perdagangan dan jasa.
2. Kota Pontianak sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat
3. Investasi di Kota Pontianak yang cukup kondusif, sehingga menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Kota Pontianak.
4. Adanya kebijakan yang dituangkan dalam peraturan berupa kemudahan dan penyederhanaan dalam pengurusan izin.

Sedangkan faktor penghambat yang menjadi kendala untuk pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, terutama untuk misi ke 4 adalah kualitas dan kompetensi SDM yang kurang memadai dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Telaahan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pontianak memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan DPMTKPTSP Kota Pontianak. Hal ini ditunjukkan melalui misi nomor 4 (empat) yaitu "*Mewujudkan masyarakat sejahtera yang mandiri, kreatif dan berdaya saing*".

2.3.3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Tantangan Pengembangan Pelayanan Perizinan dan Ketenagakerjaan:

1. DPMTKPTSP Kota Pontianak selaku OPD yang menerbitkan izin usaha, perlu melakukan koordinasi dengan instansi teknis terkait. Koordinasi tersebut dirasakan masih perlu ditingkatkan dari isi kuantitas mengingat bahwa izin dan non izin teknis daerah telah

ditetapkan standar waktu penyelesaiannya berdasarkan SOP yang telah ditetapkan.

2. Inovasi yang telah dan akan dilakukan oleh DPMTKPTSP Kota Pontianak lebih kepada sistem/teknologi informasi yang dimiliki. Sistem informasi perizinan perlu diupdate dan di upgrade setiap tahun sebagai upaya memenuhi kebutuhan masyarakat dan iklim investasi yang kondusif.
3. Selain sistem informasi, DPMTKPTSP Kota Pontianak juga harus meningkatkan sarana dan prasarana yang ada.
4. Kualitas aparat perizinan perlu ditingkatkan mengingat peraturan mengenai perizinan tersebut selalu berubah mengikuti perkembangan zaman.
5. Masih banyaknya masyarakat yang menggunakan biro jasa dalam kepengurusan izin, merupakan tantangan tersendiri bagi DPMTKPTSP Kota Pontianak. Upaya yang dilakukan adalah meningkatkan sosialisasi mengenai kemudahan pengurusan izin, melakukan jemput izin untuk mendekatkan pelayanan perizinan kepada masyarakat dan perizinan online.
6. Kualitas database perizinan perlu ditingkatkan guna optimalisasi potensi penerimaan.
7. Pendidikan dan keterampilan saat ini belum dapat sepenuhnya memenuhi pasar kerja.
8. Masih diperlukan pengembangan semangat kewirausahaan bagi penduduk usia kerja agar mampu bekerja secara mandiri dan menciptakan lapangan kerja baru.

Adapun Peluang Pengembangan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal pada DPMTKPTSP Kota Pontianak antara lain :

1. Kota Pontianak sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Barat dan letak geografis yang berbatasan langsung dengan Malaysia, memiliki peluang dalam meningkatkan iklim investasi yang kondusif. Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau Asean Economic Community (AEC) juga memberi peluang besar dalam investasi di Kota Pontianak.
2. Dukungan Kepala Daerah dan DPRD dalam penganggaran DPMTKPTSP Kota Pontianak.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Program prioritas pembangunan Kota Pontianak merupakan instrumen kebijakan pembangunan utama dalam mencapai sasaran dan tujuan yang diinginkan, sasaran yang ingin dicapai pada Tahun 2023 sangat tergantung pada kemampuan pembiayaan yang bersumber dari Pemerintah Daerah, masyarakat dan swasta. Adapun pagu anggaran/pendanaan DPMTKPTSP meliputi belanja langsung yang meliputi komponen belanja pegawai, barang/jasa dan belanja modal. Belanja langsung meliputi kegiatan rutin penunjang DPMTKPTSP dan termasuk belanja kegiatan pembangunan yang meliputi kegiatan usulan/rencana kerja kegiatan dari DPMTKPTSP Kota Pontianak.

Pada rancangan awal RKPD Tahun Anggaran 2023 DPMTKPTSP Kota Pontianak telah ditetapkan Pagu Anggaran Rp.9.650.214.000,- Mengacu pada Anggaran Tahun 2022 dan berdasarkan tujuan dan sasaran serta arah kebijakan pembangunan Kota Pontianak.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Usulan program/kegiatan yang akan dilaksanakan DPMTKPTSP Kota Pontianak pada Tahun Anggaran 2023 didasari pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPMTKPTSP Kota Pontianak Tahun 2021 yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 20 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 140 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022.

Adapun usulan anggaran pada awal musrenbang yang telah diinputkan pada Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan (SIPP) adalah:

1. Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak terdapat 5 program, 15 kegiatan dan 35 sub kegiatan dengan pagu anggaran Rp. 4.209.325.000,- (Belanja Tidak Langsung Rp.2.341.800.800,- Belanja Langsung Rp. 1.867.524.200,- pada Belanja Langsung dan setelah musrenbang selesai dilaksanakan dilakukan keselarasan program dan kegiatan dengan Renstra OPD, untuk Renja Tahun 2023.

Program dan Kegiatan pada usulan tahun 2023 ini tidak berbeda dengan tahun 2022 dikarenakan adanya Penyesuaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 serta Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 3) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - 2) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Pengadaan Mebel
 - 2) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2) Pemeliharaan Mebel
 - 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak.

- 1. Program Perencanaan Tenaga Kerja (RTK)
 - a. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
 - 1) Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
- 2. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
 - a. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
 - 1) Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
 - b. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
 - 1) Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
 - c. Pengukuran Prduktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
 - 1) Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja

3. Program Penempatan Tenaga Kerja
 - a. Pelayanan Antar kerja di Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja
 - b. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
 - 1) Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
 - 2) Job Fair/Bursa Kerja
4. Program Hubungan Industrial
 - a. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan
 - 2) Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan
 - b. Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 2) Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/ berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/ kota.
 - 3) Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 3) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - 2) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Pengadaan Mebel
 - 2) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 4) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 5) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 6) Pemeliharaan Mebel

- 7) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 8) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Pada awal usulan program dan kegiatan yang masuk kedalam Musrenbang Kota dalam Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPD) pagu yang diusulkan sebesar Rp. 9.957.676.000,- untuk Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak, dan Rp. 4.209.325.000 untuk Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak, hal ini dikarenakan adanya beberapa usulan kegiatan dari kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Pontianak. Setelah Musrenbang Kota selesai diselenggarakan, akhirnya kegiatan-kegiatan yang diusulkan oleh kecamatan diselaraskan dengan Renstra DPMTKPTSP Kota Pontianak, beberapa kegiatan dari kecamatan tersebut diakomodir dalam Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja. Kemudian dari 6 Kecamatan yang ada di Kota Pontianak maka akan dipilih beberapa orang untuk mengikuti pelatihan-pelatihan dari program tersebut yang keseluruhan pendanaannya akan dibiayai oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak.

Tabel 2.7
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku
Keperentingan Kota Pontianak
Tahun 2023

Nama Perangkat Daerah : Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pelatihan service handphone	DEKOPIN Kota Pontianak	Jumlah Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	1 Paket	Diakomodir
2	Pelatihan service handphone	DEKOPIN Kota Pontianak	Jumlah Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	1 Paket	Diakomodir
3	Pelatihan Mekanik Sepeda Motor	DEKOPIN Kota Pontianak	Jumlah Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	1 Paket	Diakomodir

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap kebijakan Nasional

Rencana tata ruang wilayah merupakan acuan bagi Pemerintah Kota Pontianak dalam melaksanakan pembangunan dan menjadi dasar perumusan dalam berbagai aspek kebijakan.

Kota Pontianak mempunyai fungsi dan peran yaitu :

1. Kota Pontianak sebagai PKN (Pusat Kegiatan Nasional) dengan fungsi dan peran sebagai berikut :
 - Menjadi pintu gerbang ke kawasan-kawasan internasional (khususnya ASEAN) dan menjadi pendorong bagi daerah sekitarnya.
 - Sebagai pusat jasa-jasa pelayanan keuangan/bank dengan skala pelayanan nasional atau melayani beberapa provinsi.
 - Sebagai pusat pengolahan/pengumpul barang secara nasional atau beberapa provinsi.
 - Sebagai simpul transportasi secara nasional atau untuk beberapa provinsi di sekitarnya.
 - Sebagai pusat jasa pemerintah untuk nasional atau meliputi beberapa provinsi di sekitarnya.
 - Sebagai pusat jasa-jasa kemasyarakatan.
 - Fungsi dan peran kota Pontianak dalam konstelasinya terhadap wilayah regional yaitu sebagai pusat perdagangan dan jasa serta sebagai pintu masuk dan keluar baik barang maupun orang ke wilayah provinsi Kalimantan barat.
2. Kota Pontianak Sebagai Pendorong Daerah Sekitarnya, maka di Kota Pontianak harus tersedia fasilitas dan uang untuk memberikan jasa pelayanan untuk mewedahi kegiatan terkait dengan sektor unggulan di kawasan sekitarnya (berperan sebagai pintu keluar perdagangan untuk produk sekitar unggulan maupun

industri pengelolaan tanaman pangan/ perkebunan dan perikanan laut yang berasal dari wilayah luar Kota Pontianak).

3. Kota Pontianak sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Kalbar. Dimana kota-kota yang merupakan kota penyebar kegiatan ekonomi dan Pontianak tersebut terdiri dari singkawang, sintang, sanggau, dan ketapang.
4. Kota Pontianak diarahkan untuk dikembangkan sebagai Pelabuhan Internasional dalam sistem simpul transportasi laut Indonesia mengacu pada fungsi dan peran Kota Pontianak tersebut, maka sesuai dengan visi dan misi DPMTKPTSP Kota Pontianak diarahkan guna mewujudkan peningkatan perekonomian masyarakat Kota Pontianak melalui peningkatan jumlah investasi yang menanamkan modalnya di Kota Pontianak setiap tahunnya.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja DPMTKPTSP

3.2.1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1-5 tahun. Penetapan tujuan dalam rencana strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama pada DPMTKPTSP Kota Pontianak.

Adapun rumusan tujuan di dalam perencanaan strategis DPMTKPTSP Kota Pontianak tahun 2023 adalah :

1. Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat;
2. Meningkatnya investasi daerah;
3. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja.

3.2.2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh DPMTKPTSP Kota Pontianak dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang.

Perumusan sasaran harus memiliki kriteria “SMART”. Analisis “SMART” digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (*specific*), terukur (*Measurable*), dapat dicapai (*attainable*), nyata (*realistic*) dan tepat waktu (*time bound*).

Sasaran di dalam perencanaan strategis DPMTKPTSP Kota Pontianak Tahun 2023 adalah :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan penanaman modal
Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:
 - a). Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2. Terwujudnya investasi yang efektif dan efisien
Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:
 - a). Persentase Peningkatan Investasi Daerah (PMA/PMDN)
3. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja yang optimal
Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:
 - a). Rasio Penduduk Yang Bekerja

4. Terciptanya hubungan industrial yang harmonis
Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator :
- a) Besaran Kasus Yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)
 - b) Besaran Pekerja/ Buruh yang menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan.

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
 - Berdasarkan kondisi Kota Pontianak, maka tantangan yang dihadapi lima tahun mendatang dan mengacu pada amanat RPJM Propinsi Kalimantan Barat, maka Visi Pembangunan Kepala Daerah adalah :
“PONTIANAK KOTA KHATULISTIWA BERWAWASAN LINGKUNGAN, CERDAS DAN BERMARTABAT”.

Adapun misi yang telah ditetapkan berdasarkan visisebagaimana tersebut diatas adalah sebagai berikut :

- Misi 1 : Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya.
- Misi 2 : Menciptakan infrastruktur perkotaan yang berkualitas dan representatif.
- Misi 3 : Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan teknologi informasi serta aparatur yang berintegritas, bersih dan cerdas.

Misi 4 : Mewujudkan masyarakat sejahtera yang mandiri, kreatif dan berdaya saing.

Misi 5 : Mewujudkan kota yang bersih, hijau, aman, tertib dan berkelanjutan

Mengacu pada misi ke 4 (empat) tersebut diatas, maka ada beberapa faktor pendorong yang sangat dimungkinkan untuk pencapaian misi tersebut melalui visi dan misi yang ditetapkan oleh DPMTKPTSP Kota Pontianak yaitu:

1. Kota Pontianak adalah sebagai pusat perdagangan dan jasa.
2. Kota Pontianak sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat.
3. Investasi di Kota Pontianak yang cukup berkembang, sehingga dapat mewujudkan masyarakat sejahtera mandiri.
4. Adanya kebijakan yang dituangkan dalam peraturan berupa kemudahan dan penyederhanaan dalam pengurusan izin.

Berdasarkan Keputusan Walikota Pontianak Nomor 1261/DPMTKPTSP/Tahun 2020 tentang tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada DPMTKPTSP melayani jenis pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan secara terpadu yaitu:

1. Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Investasi (PI).
2. Pelayanan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
3. Pelayanan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal.

4. Pelayanan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Pelatihan Kerja.
5. Pelayanan Penerbitan Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
6. Izin Pembuangan Limbah Cair.
7. Pelayanan Pemenuhan Komitmen Online Single Submission.
8. Pelayanan Penerbitan / Rekomendasi Pendahuluan Walikota.
9. Pelayanan Penanganan Pengaduan Perizinan.
10. Pelayanan Penerbitan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL).
11. Pelayanan penerbitan dan perpanjangan Kartu Angkatan Kerja (AK.1).
12. Pelayanan Surat Persetujuan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL).
13. Pelayanan Pengajuan Permohonan Keringanan Retribusi Perizinan Tertentu.
14. Pelayanan penerbitan rekomendasi pembukaan dan perpanjangan kantor cabang pelaksana penempatan tenaga kerja indonesia swasta (PPTKIS).
15. Pelayanan Penerbitan surat pengantar pembuatan paspor calon tenaga kerja Indonesia.

Kemudian Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak juga melayani jenis pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan secara Online Single Submission, yaitu:

1. Pelayanan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
2. Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Industri (TDI) / Izin Usaha Industri (IUI).

3. Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK).
4. Pelayanan Penerbitan Izin Trayek.
5. Pelayanan Penerbitan Surat Izin Usaha Angkutan Umum (IUA).
6. Pelayanan Penerbitan Izin Fasilitasi Pelayanan Kesehatan.
7. Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan.
8. Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK).
9. Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
10. Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Gudang (TDG).
11. Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP).
12. Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional.
13. Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Pusat Perbelanjaan.
14. Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Toko Modern (IUTM).
15. Pelayanan Penerbitan Izin Lingkungan.

Untuk melaksanakan administrasi perizinan tersebut, DPMTKPTSP Kota Pontianak memiliki Sistem Pelayanan Terpadu (SIMYANDU) dan mengolah Sistem Online Single Submission (OSS).

a. Rekapitulasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

DPMTKPTSP Kota Pontianak pada Tahun Anggaran 2023 akan pisah menjadi dua Dinas, yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak, dan Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak melakukan 6 program, 13 kegiatan dan 38 sub kegiatan dengan lokasi di Kota Pontianak. Adapun dana / pagu indikatif bersumber dari APBD Kota Pontianak sebesar Rp. 9.957.676.000,-

Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak melakukan 5 Program, Jumlah Kegiatan 15, dan 35 Sub Kegiatan dengan lokasi dikota Pontianak. Adapun dana/ pagu indikatif bersumber dari APBD Kota Pontianak sebesar Rp. 4.209.325.000,-

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 antara lain :

Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Pontianak.

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
 - a. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
 - 2) Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
 - b. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota
 - 1) Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota
 - 2) Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota
2. Program Promosi Penanaman Modal
 - a. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal.

- 2) Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota.
3. Program Pelayanan Penanaman Modal
 - a. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
 - 2) Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
 - 3) Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
 - 4) Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah
4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
 - a. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
 - 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
 - 3) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

5. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
 - a. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 3) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - 2) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 5) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - 6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 1) Pengadaan Mebel
 - 2) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b. Pemeliharaan Mebel
 - c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak.

7. Program Perencanaan Tenaga Kerja (RTK)
 - a. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
 - 1) Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
8. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
 - a. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
 - 1) Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
 - b. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
 - 1) Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
 - c. Pengukuran Prduktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
 - 1) Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja
9. Program Penempatan Tenaga Kerja
 - a. Pelayanan Antar kerja di Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja
 - b. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
 - 1) Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
 - 2) Job Fair/Bursa Kerja
10. Program Hubungan Industrial
 - a. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan

2) Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan

b. Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

1) Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

2) Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/ berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/ kota.

3) Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota

11. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 3) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

h. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- 3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

- i. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- j. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 5) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - 6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- k. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Pengadaan Mebel
 - 2) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- l. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- m. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2) Pemeliharaan Mebel
 - 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Pada awal usulan program dan kegiatan yang masuk kedalam Musrenbang Kota dalam Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPD) pagu yang diusulkan sebesar Rp. 9.957.676.000,- untuk Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak, dan Rp. 4.209.325.000 untuk Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak, hal ini dikarenakan adanya beberapa usulan kegiatan dari kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Pontianak. Setelah Musrenbang Kota selesai diselenggarakan, akhirnya kegiatan-kegiatan yang diusulkan oleh kecamatan diselaraskan dengan Renstra OPD DPMTKPTSP Kota Pontianak, beberapa kegiatan dari kecamatan tersebut diakomodir dalam Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja. Kemudian dari 6 Kecamatan yang ada di Kota Pontianak maka akan dipilih beberapa orang untuk mengikuti pelatihan-pelatihan dari program tersebut yang keseluruhan pendanaannya akan dibiayai oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 RENCANA KERJA

Rencana Kerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 untuk mendukung program dan kegiatan prioritas daerah dapat dilihat pada tabel

4.2 PENDANAAN

Pendanaan untuk mencapai Rencana Kerja yang telah ditetapkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak Tahun 2022 berasal dari APBD Kota Pontianak dan Dana Alokasi Khusus bidang Penanaman Modal. Dana Alokasi Khusus berupa Dana Alokasi Khusus Non Fisik Penanaman Modal.

Perincian Pendanaan dapat dilihat pada Tabel 4.1 sebagai berikut:

BAB V

PENUTUP

Rencana kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak yang disusun untuk satu tahun Anggaran berdasarkan Rencana Strategi (Renstra) tahun 2020- 2024 adalah merupakan dokumen perencanaan yang mengacu pada RPJMD Kota Pontianak tahun 2020 - 2024 yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai.

Akhirnya dengan tersusunnya Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023, semoga dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan program/ kegiatan/ sub kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kota Pontianak.

Pontianak, 2022

**Pit. KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KOTA PONTIANAK**

TINORMA BUTAR-BUTAR, SH

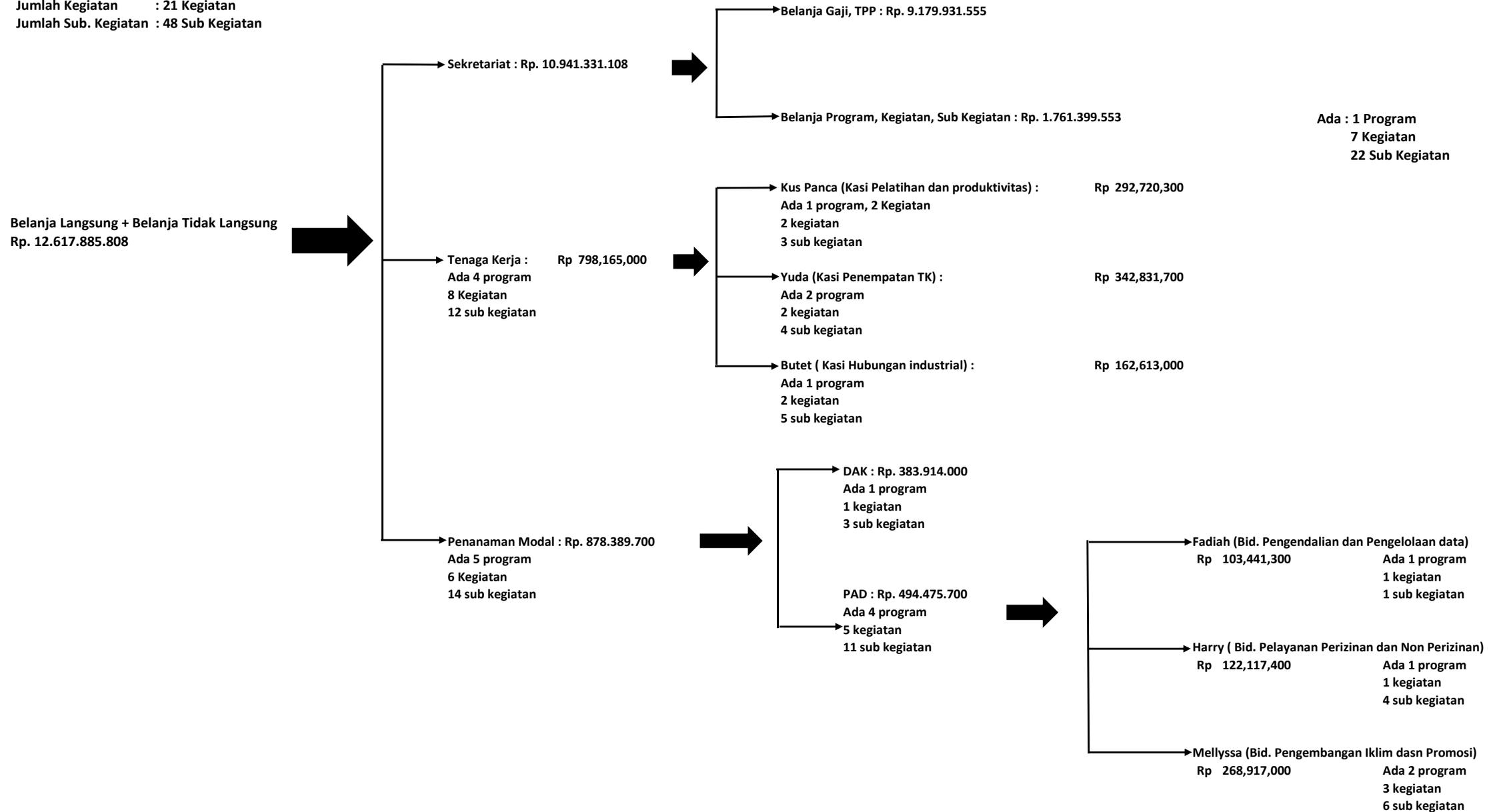
Pembina Tk. I

NIP. 19640926 199403 2 002

SKEMA ANGGARAN TAHUN 2022

Pagu (BTL+BL) : Rp. 12.617.885.808
BTL (Belanja Gaji dan TPP) : Rp. 9.179.931.555
BL (Belanja Program, Kegiatan, Sub Kejiata) : Rp. 3.437.954.253

Jumlah Program : 10 Program
 Jumlah Kegiatan : 21 Kegiatan
 Jumlah Sub. Kegiatan : 48 Sub Kegiatan



TABEL 1

**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD
DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD s/d TAHUN 2022
Kota Pontianak**

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA, SKPD) TAHUN 2022	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d 2020	TARGET DAN REALISASI KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)			TARGET PROGRAM & KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN 2022)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD s/d TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA SKPD TAHUN 2021	REALISASI RENJA SKPD TAHUN 2021	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN BERJALAN tahun 2022	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 07 03	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase peserta pelatihan yang lulus dan mendapat sertifikat kompetensi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
2 07 03 2.01	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah pelatihan berdasarkan unit kompetensi	2 Pelatihan	100%	2 Pelatihan	2 Pelatihan	100%	2 Pelatihan	5 Jenis	250%
2 07 03 2.01 01	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah peserta yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi, dan kewirausahaan	60 Peserta	100%	60 Peserta	60 Peserta	100%	30 Peserta	91 Peserta	152%
2 07 03 2.02	Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga kerja swasta yang dibina	80 Lembaga	100%	80 Lembaga	80 Lembaga	100%	80 Lembaga	161 Lembaga	201%
2 07 03 2.02 01	Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah lembaga kerja swasta yang dibina	65 Lembaga	100%	65 Lembaga	65 Lembaga	100%	65 Lembaga	131 Lembaga	202%
2 07 04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase peningkatan pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui job fair	70%	100%	70%	70%	100%	70%	141 %	201%
2 07 04 2.01	Kegiatan Pelayanan antar kerja di daerah kabupaten/ kota	Jumlah Peserta penyuluhan dan bimbingan jabatan yang diberikan kepada pencari kerja	4 Kali	100%	4 Kali	4 Kali	100%	4 Kali	9 Kali	225%
2 07 04 2.01 03	Sub Kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan jabatan bagi pencari kerja	Jumlah Peserta penyuluhan dan bimbingan jabatan yang diberikan kepada pencari kerja	120 Orang	100%	120 Orang	120 Orang	100%	120 Orang	211 Otang	176%
2 07 04 2.03	Kegiatan Pengelolaan informasi pasar kerja	Persentase terisinya lowongan yang tersedia melalui job fair	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
2 07 04 2.03 03	Sub Kegiatan Job fair/ Bursa Kerja	Jumlah lowongan kerja yang terdaftar	1100 Perusahaan	100%	1100 Perusahaan	1100 Perusahaan	100%	1100 Perusahaan	2201 Perusahaan	200%
2 07 04 2.03 02	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Perusahaan Yang menggunakan Informasi Pasar kerja (IPK) Online	100 Perusahaan	100%	100 Perusahaan	100 Perusahaan	100%	100 Perusahaan	201 Perusahaan	201%
2 07 05	Program Hubungan Industrial	Persentase tenaga kerja yang dilindungi sesuai dengan peraturan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
2 07 05 2.01	Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Regulasi Perizinan dan Penanaman Modal	10 Kali	100%	10 Kali	10 Kali	100%	10 Kali	21 Kali	210%
2 07 05 2.01 01	Sub Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Terlaksananya Kegiatan penyebarluasan Berbagai peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan	4 Kali	100%	4 Kali	4 Kali	100%	4 Kali	9 Kali	225%
2 07 05 2.01 03	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta pengupahan	Peningkatan Kepesertaan Kesejahteraan tenaga kerja dalam kesepertaan BPJS ketenagakerjaan, pendataan kebutuhan hidup layak (KHL)	60 Perusahaan	100%	60 Perusahaan	60 Perusahaan	100%	60 Perusahaan	121 Perusahaan	202%
2 07 05 2.02	Kegiatan Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di Kota Pontianak	Jumlah Kegiatan Pembahasan Permasalahan Ketenagakerjaan	3 Kali	100%	3 Kali	3 Kali	100%	3 Kali	7 Kali	233%
2 07 05 2.02 01	Sub Kegiatan Pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/ berdampak pada kepentingan di satu daerah kabupaten/kota	Jumlah peserta sosialisasi hubungan industrial yang harmonis	70 Peserta	100%	70 Peserta	70 Peserta	100%	50 Perusahaan	121 Peserta	173%
2 07 05 2.02 04	Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Kota	Jumlah Pembahasan Permasalahan Ketenagakerjaan	12 Kali	100%	12 Kali	12 Kali	100%	9 Kali	22 Kali	183%
2 18 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Presentase Tingkat Kepuasan Bidang/ Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%

2	18	02	2.01	01	Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	Jumlah kebijakan dan regulasi perizinan dan penanaman modal	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	7	Dokumen	233%
2	18	02	2.01	02	Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	Jumlah kegiatan evaluasi mekanisme prosedur dan penerbitan perizinan	12 Kali	100%	12 Kali	12 Kali	100%	12 Kali	25	Kali	208%
2	18	03			Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Informasi Penanaman Modal Yang Didapatkan Oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%		75%
2	18	03	2.01		Kegiatan Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kota	Jumlah Buku Profil Investasi yang Disusun	85 Buku	100%	85 Buku	85 Buku	100%	85 Buku	171	Buku	201%
2	18	3	2.01	022	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman modal daerah kabupaten/kota	Terlaksananya pemantauan kegiatan pelaksanaan penanaman modal	1 Kegiatan	100%	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	1 Kegiatan	3	Kegiatan	300%
2	18	04			Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal yang Sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%		300%
2	18	04	2.01		Kegiatan Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kota	Terseleenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%		300%
2	18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	jumlah berkas pemenuhan komitmen izin Usaha yang masuk	1500 Berkas	100%	1100 Berkas	1100 Berkas	100%	1500 Berkas	2601	Berkas	173%
2	18	04	2.01	02	Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan	jumlah koordinasi penerbitan pelayanan perizinan dan non perizinan	190 Perusahaan/Berkas	100%	190 Perusahaan/Berkas	190 Perusahaan/Berkas	100%	190 Perusahaan/Berkas	381	Berkas	201%
2	18	04	2.01	03	Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	jumlah permasalahan yang difasilitasi	5 Pengaduan	100%	5 Pengaduan	5 Pengaduan	100%	5 Pengaduan	11	Pengaduan	220%
2	18	04	2.01	04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	jumlah piutang retribusi yang ditagih	Rp 2,579,263,180	100%	Rp 2,579,263,180	Rp 2,579,263,180	100%	2579263180	Rp5,158,526,361		200%
2	18	5			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Perusahaan PMA/PMDN Yang Melaporkan Investasi Penanaman Modal Sesuai SOP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%		300%
2	18	5	2.01		Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%		300%
2	18	5	2.01	1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya pemantauan kegiatan pelaksanaan penanaman modal	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	25	Bulan	208%
2	18	5	2.01	2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah peserta bimbingan teknis/ sosialisasi kemudahan berusaha	240 Peserta	100%	240 Peserta	240 Peserta	100%	240 Peserta	481	Peserta	200%
2	18	5	2.01	3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya Pengawasan kegiatan Penanaman Modal	69 Kali	100%	69 Kali	69 Kali	100%	69 Kali	139	Kali	201%
2	18	6			Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Sistem Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pelayanan Publik yang Terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%		300%
2	18	6	2.01		Kegiatan Pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kota pontianak	Terlaksananya pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kota pontianak	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%		300%
2	18	6	2.01	1	Sub Kegiatan Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah laporan data peningkatan Sistem Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Berusaha yang terintegrasi	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	25	Bulan	208%

TABEL 2

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DISNAKER KOTA PONTIANAK

NO.	INDIKATOR	SPM/ Standar Nasional	IKK	TARGET RENSTRA SKPD				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN
				Thn 2020	Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023	Thn 2020	Thn 2021	Thn 2023	Thn 2024	ANALISIS
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11			14
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan DPMTKPTSP		1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan DPMTKPTSP	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	
2	Meningkatnya Investasi Daerah		2 Persentase Peningkatan Investasi Daerah (PMA/PMDN)	5%	5%	6%	6%	4,04%	159%	6%	6%	

TABEL 3

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA
1	2	3	4	5	6	2	8	9	10	11
	URUSAN PEMERINTAHAN DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PONTIANAK					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	DPMTKPTSP Kota Pontianak			
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Tingkat Kepuasan bidang/bagianterhadap pelayanan kesekretariatan	100%	8,936,085,400	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DPMTKPTSP Kota Pontianak	Persentase Tingkat Kepuasan bidang/bagianterhadap pelayanan kesekretariatan	100%	8,936,085,400
	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase TingkatKepuasan Bidang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	100%	19,304,000	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPMTKPTSP Kota Pontianak	Persentase TingkatKepuasan Bidang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	100%	19,304,000
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPMTKPTSP	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang disusun	12 Dokumen	11,582,400	2 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPMTKPTSP Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang disusun	12 Dokumen	11,582,400
	2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DPMTKPTSP	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4 Laporan	3,860,800	3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DPMTKPTSP Kota Pontianak	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4 Laporan	3,860,800
	3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPMTKPTSP	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	3,860,800	4 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPMTKPTSP Kota Pontianak	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	3,860,800
	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jangka Waktu Penyelenggaraan Adminsitrası Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	6,531,051,100	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DPMTKPTSP Kota Pontianak	Jangka Waktu Penyelenggaraan Adminsitrası Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	6,531,051,100
	1 Penyediaan Gaji danTunjangan ASN	DPMTKPTSP	Jangka WaktuPenyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	6,151,200,000	1 Penyediaan Gaji danTunjangan ASN	DPMTKPTSP Kota Pontianak	Jangka WaktuPenyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	6,151,200,000
	2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DPMTKPTSP	Jangka Waktu Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Bulan	361,563,100	1 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DPMTKPTSP Kota Pontianak	Jangka Waktu Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Bulan	361,563,100
	3 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	DPMTKPTSP	Jangka WaktuPelaksanaan Akuntansi SKPD	13 Laporan	18,288,000	2 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	DPMTKPTSP Kota Pontianak	Jangka Waktu Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi SKPD	13 Laporan	18,288,000
	3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DPMTKPTSP	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	100%	119,501,400	3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DPMTKPTSP Kota Pontianak	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	100%	119,501,400
	1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	DPMTKPTSP	Jumlah Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	129 Stel	65,630,000	1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	DPMTKPTSP Kota Pontianak	Jumlah Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	129 Stel	65,630,000
	2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	DPMTKPTSP	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Formal	10 ASN	53,871,400	2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	DPMTKPTSP Kota Pontianak	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Formal	10 ASN	53,871,400
	4 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	100%	662,837,800	4 Administrasi Umum Perangkat Daerah	DPMTKPTSP Kota Pontianak	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	100%	662,837,800
	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DPMTKPTSP	Jangka waktu penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	12 Bulan	20,000,000	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DPMTKPTSP Kota Pontianak	Jangka waktu penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	12 Bulan	20,000,000

TABEL 3

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA
1	2	3	4	5	6	2	8	9	10	11
	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPMTKPTSP	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 Bulan	280,000,000	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPMTKPTSP Kota Pontianak	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 Bulan	280,000,000
	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DPMTKPTSP	Jumlah unit peralatan rumah tangga yang disediakan	12 Bulan	190,000,000	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DPMTKPTSP Kota Pontianak	Jumlah unit peralatan rumah tangga yang disediakan	12 Bulan	190,000,000
	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DPMTKPTSP	Jangka waktu penyediaan bahan logistik	12 Bulan	55,000,000	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DPMTKPTSP Kota Pontianak	Jangka waktu penyediaan bahan logistik	12 Bulan	55,000,000
	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DPMTKPTSP	Jangka waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	73,848,800	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DPMTKPTSP Kota Pontianak	Jangka waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	73,848,800
	6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	DPMTKPTSP	Jangka waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	6,460,000	6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	DPMTKPTSP Kota Pontianak	Jangka waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	6,460,000
	7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPMTKPTSP	Jangka waktu rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	12 Bulan	37,529,000	7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPMTKPTSP Kota Pontianak	Jangka waktu rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	12 Bulan	37,529,000
	5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	100%	1,058,100,400	5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DPMTKPTSP Kota Pontianak	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	100%	1,058,100,400
	1 Pengadaan Mebel	DPMTKPTSP	Jumlah unit pengadaan mebel	8 Unit	500,000,000	1 Pengadaan Mebel	DPMTKPTSP Kota Pontianak	Jumlah unit pengadaan mebel	8 Unit	500,000,000
	2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPMTKPTSP	Jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana pendukung kantor atau bangunan lainnya	12 Unit	558,100,400	2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPMTKPTSP Kota Pontianak	Jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana pendukung kantor atau bangunan lainnya	12 Unit	558,100,400
	6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	100%	477,253,100	6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPMTKPTSP Kota Pontianak	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	100%	477,253,100
	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPMTKPTSP	Jumlah Jangka Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	8,000,000	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPMTKPTSP Kota Pontianak	Jangka waktu penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	8,000,000
	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPMTKPTSP	Jangka waktu penyediaan jasa layanan internet, telepon, air dan listrik	12 Bulan	300,000,000	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPMTKPTSP Kota Pontianak	Jangka waktu penyediaan jasa layanan internet, telepon, air dan listrik	12 Bulan	300,000,000
	3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPMTKPTSP	Jangka Waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Unit Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	12 Bulan	169,253,100	3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPMTKPTSP Kota Pontianak	Jangka Waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Unit Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	12 Bulan	169,253,100
	7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	100%	68,037,600	7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPMTKPTSP Kota Pontianak	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	100%	68,037,600
	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPMTKPTSP	Jumlah Kendaraan Dinas operasional / lapangan yang dipelihara	5 Unit	25,000,000	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPMTKPTSP Kota Pontianak	Jumlah Kendaraan Dinas operasional / lapangan yang dipelihara	5 Unit	25,000,000
	2 Pemeliharaan Mebel	DPMTKPTSP	Jumlah Mebel yang dipelihara	16 Unit	9,000,000	2 Pemeliharaan Mebel	DPMTKPTSP Kota Pontianak	Jumlah Mebel yang dipelihara	16 Unit	9,000,000
	3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPMTKPTSP	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	12 Bulan	26,405,800	3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPMTKPTSP Kota Pontianak	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	12 Bulan	26,405,800

TABEL 3

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA
1	4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DPMTKPTSP	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Gedung	7,631,800	4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DPMTKPTSP Kota Pontianak	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Gedung	7,631,800
2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		PERSENTASE PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL YANG DILAKSANAKAN	100%	30,027,300	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	DPMTKPTSP Kota Pontianak	PERSENTASE PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL YANG DILAKSANAKAN	100%	30,027,300
	1 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah/kota	3 Dokumen	30,027,300	1 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	DPMTKPTSP Kota Pontianak	Jumlah Kebijakan dan Regulasi Perizinan dan Penanaman Modal	3 Dokumen	30,027,300
	1 Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	DPMTKPTSP	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	3 Dokumen	14,580,000	1 Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	DPMTKPTSP Kota Pontianak	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	3 Dokumen	14,580,000
	2 Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	DPMTKPTSP	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	12 Kegiatan Usaha	15,447,300	2 Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	DPMTKPTSP Kota Pontianak	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	12 Kegiatan Usaha	15,447,300
	2 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota		Terlaksananya pembuatan peta potensi investasi kota	1 Dokumen	111,609,900	2 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	DPMTKPTSP Kota Pontianak	Terlaksananya pembuatan peta potensi investasi kota	1 Dokumen	111,609,900
	1 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	DPMTKPTSP	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	52,399,900	1 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	DPMTKPTSP Kota Pontianak	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	52,399,900
	2 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	DPMTKPTSP	Jumlah Dokumen Peta Investasi Kota Pontianak	1 Dokumen	59,210,000	2 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	DPMTKPTSP Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Peta Investasi Kota Pontianak	1 Dokumen	59,210,000
3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		PERSENTASE INFORMASI PENANAMAN MODAL YANG DIDAPATKAN OLEH MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA	100%	64,979,300	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	DPMTKPTSP Kota Pontianak	PERSENTASE INFORMASI PENANAMAN MODAL YANG DIDAPATKAN OLEH MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA	100%	64,979,300
	1 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah/kota	100%	64,979,300	1 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	DPMTKPTSP Kota Pontianak	Terlaksananya promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah/kota	100%	64,979,300
	1 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	DPMTKPTSP	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	26,670,000	1 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	DPMTKPTSP Kota Pontianak	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	26,670,000
	1 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	DPMTKPTSP	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan/diikuti dalam rangka promosi daerah	1 Dokumen	38,309,300	1 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	DPMTKPTSP Kota Pontianak	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan/diikuti dalam rangka promosi daerah	1 Dokumen	38,309,300
4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		PERSENTASE PELAYANAN PERIZINAN, NON PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL YANG SESUAI DENGAN SOP	100%	58,281,000	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	DPMTKPTSP Kota Pontianak	PERSENTASE PELAYANAN PERIZINAN, NON PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL YANG SESUAI DENGAN SOP	100%	58,281,000
	1 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kota	100%	58,281,000	1 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	DPMTKPTSP Kota Pontianak	Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kota	100%	58,281,000

TABEL 3

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA
1	2	3	4	5	6	2	8	9	10	11
	1 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	DPMTKPTSP	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1500 Pelaku Usaha	12,501,000	1 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	DPMTKPTSP Kota Pontianak	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1500 Pelaku Usaha	12,501,000
	2 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	DPMTKPTSP	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	190 Kegiatan Usaha	27,000,000	2 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	DPMTKPTSP Kota Pontianak	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	190 Kegiatan Usaha	27,000,000
	3 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	DPMTKPTSP	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	5 Pengaduan	9,480,000	3 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	DPMTKPTSP Kota Pontianak	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	5 Pengaduan	9,480,000
	4 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	DPMTKPTSP	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	2579263180 Kegiatan Usaha	9,300,000	4 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	DPMTKPTSP Kota Pontianak	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	2579263180 Kegiatan Usaha	9,300,000
5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		PERSENTASE PERUSAHAAN PMA/PMDN YANG MELAPORKAN INVESTASI PENANAMAN MODAL SESUAI SOP	100%	383,914,000	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	DPMTKPTSP Kota Pontianak	PERSENTASE PERUSAHAAN PMA/PMDN YANG MELAPORKAN INVESTASI PENANAMAN MODAL SESUAI SOP	100%	383,914,000
	1 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah/kota	100%	383,914,000	1 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	DPMTKPTSP Kota Pontianak	Jumlah kegiatan pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kota	100%	383,914,000
	1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Wilayah Kota Pontianak	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Moda	350 Kegiatan Usaha	35,560,000	1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	DPMTKPTSP Kota Pontianak	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Moda	350 Kegiatan Usaha	35,560,000
	2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Wilayah Kota Pontianak	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	480 Pelaku Usaha	287,394,000	2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	DPMTKPTSP Kota Pontianak	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	480 Pelaku Usaha	287,394,000
	3 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Wilayah Kota Pontianak	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	600 Kegiatan Usaha	60,960,000	3 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	DPMTKPTSP Kota Pontianak	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	600 Kegiatan Usaha	60,960,000
6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		PERSENTASE SISTEM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK YANG TERINTEGRASI	100%	63,317,100	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	DPMTKPTSP Kota Pontianak	PERSENTASE SISTEM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK YANG TERINTEGRASI	100%	63,317,100
	1 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Telaksananya pengelolaan data dan informasi perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah KotaPontianak	100%	63,317,100	1 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DPMTKPTSP Kota Pontianak	Telaksananya pengelolaan data dan informasi perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah KotaPontianak	100%	63,317,100

TABEL 3

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA
1	2	3	4	5	6	2	8	9	10	11
	1 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	DPMTKPTSP	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	12 Dokumen	63,317,100	1 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	DPMTKPTSP Kota Pontianak	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	12 Dokumen	63,317,100

**CATATAN
PENTING**

12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

**CATATAN
PENTING**

12

CATATAN PENTING
12

NO.	RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	2	8	9	10	
	3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaiannya	6 ASN/ 113 Stel	112,436,000	3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DPMTKPTSP Kota Pontianak	Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaiannya	6 ASN/ 113 Stel	
	1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	DPMTKPTSP	Jumlah Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	113 Stel	70,860,000	1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	DPMTKPTSP Kota Pontianak	Jumlah Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	113 Stel	
	2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	DPMTKPTSP	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Formal	6 ASN	41,576,000	2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	DPMTKPTSP Kota Pontianak	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Formal	6 ASN	
	4 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	456,195,100	4 Administrasi Umum Perangkat Daerah	DPMTKPTSP Kota Pontianak	Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	
	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DPMTKPTSP	Jangka waktu penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	12 Bulan	5,287,300	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DPMTKPTSP Kota Pontianak	Jangka waktu penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	12 Bulan	
	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPMTKPTSP	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 Unit	42,150,200	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPMTKPTSP Kota Pontianak	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 Unit	
	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DPMTKPTSP	Jumlah unit peralatan rumah tangga yang disediakan	616 Unit	172,197,200	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DPMTKPTSP Kota Pontianak	Jumlah unit peralatan rumah tangga yang disediakan	616 Unit	
	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DPMTKPTSP	Jangka waktu penyediaan bahan logistik kantor	12 Bulan	63,759,000	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DPMTKPTSP Kota Pontianak	Jangka waktu penyediaan bahan logistik kantor	12 Bulan	
	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DPMTKPTSP	Jangka waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	75,910,400	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DPMTKPTSP Kota Pontianak	Jangka waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	
	6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	DPMTKPTSP	Jangka waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	7,462,000	6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	DPMTKPTSP Kota Pontianak	Jangka waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	
	7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPMTKPTSP	Jangka waktu rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	12 Bulan	89,429,000	7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPMTKPTSP Kota Pontianak	Jangka waktu rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	12 Bulan	
	5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	20 Unit	54,302,475	5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DPMTKPTSP Kota Pontianak	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	20 Unit	
	1 Pengadaan Mebel	DPMTKPTSP	Jumlah unit pengadaan mebel	14 Unit	26,979,475	1 Pengadaan Mebel	DPMTKPTSP Kota Pontianak	Jumlah unit pengadaan mebel	14 Unit	
	2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPMTKPTSP	Jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana pendukung kantor atau bangunan lainnya	6 Unit	27,323,000	2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPMTKPTSP Kota Pontianak	Jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana pendukung kantor atau bangunan lainnya	6 Unit	
	6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jangka waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 Bulan	294,371,225	6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPMTKPTSP Kota Pontianak	Jangka waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 Bulan	
	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPMTKPTSP	Jangka waktu penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	4,820,000	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPMTKPTSP Kota Pontianak	Jangka waktu penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	
	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPMTKPTSP	Jangka waktu penyediaan jasa layanan internet, telepon, air dan listrik	12 Bulan	113,900,475	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPMTKPTSP Kota Pontianak	Jangka waktu penyediaan jasa layanan internet, telepon, air dan listrik	12 Bulan	
	3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPMTKPTSP	Jangka waktu penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	175,650,750	3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPMTKPTSP Kota Pontianak	Jangka waktu penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	

KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
11	12
112,436,000	
70,860,000	
41,576,000	
456,195,100	
5,287,300	
42,150,200	
172,197,200	
63,759,000	
75,910,400	
7,462,000	
89,429,000	
54,302,475	
26,979,475	
27,323,000	
294,371,225	
4,820,000	
113,900,475	
175,650,750	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPd					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	57 Unit	119,250,900	7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPMTKPTSP Kota Pontianak	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	57 Unit	119,250,900
	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPMTKPTSP	Jumlah Kendaraan Dinas operasional / lapangan yang dipelihara	5 Unit	11,558,500		1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPMTKPTSP Kota Pontianak	Jumlah Kendaraan Dinas operasional / lapangan yang dipelihara	5 Unit	11,558,500
	2 Pemeliharaan Mebel	DPMTKPTSP	Jumlah Mebel yang dipelihara	16 Unit	5,084,500		2 Pemeliharaan Mebel	DPMTKPTSP Kota Pontianak	Jumlah Mebel yang dipelihara	16 Unit	5,084,500
	3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPMTKPTSP	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	12 Unit	27,242,700		3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPMTKPTSP Kota Pontianak	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	12 Unit	27,242,700
	4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DPMTKPTSP	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	24 Unit	75,365,200		4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DPMTKPTSP Kota Pontianak	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	24 Unit	75,365,200
2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		PERSENTASE PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL YANG DILAKSANAKAN	100%	217,630,900	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	DPMTKPTSP Kota Pontianak	PERSENTASE PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL YANG DILAKSANAKAN	100%	217,630,900	
	1 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kebijakan dan Regulasi Perizinan dan Penanaman Modal	3 Dokumen	104,388,900	1 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	DPMTKPTSP Kota Pontianak	Jumlah Kebijakan dan Regulasi Perizinan dan Penanaman Modal	3 Dokumen	104,388,900	
	1 Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	DPMTKPTSP	Jumlah Kebijakan dan Regulasi Perizinan dan Penanaman Modal	3 Dokumen	91,368,500	1 Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	DPMTKPTSP Kota Pontianak	Jumlah Kebijakan dan Regulasi Perizinan dan Penanaman Modal	3 Dokumen	91,368,500	
	2 Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	DPMTKPTSP	Jumlah Kegiatan evaluasi mekanisme prosedur dan penerbitan perizinan	12 Kali	13,020,400	2 Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	DPMTKPTSP Kota Pontianak	Jumlah Kegiatan evaluasi mekanisme prosedur dan penerbitan perizinan	12 Kali	13,020,400	
2	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota		Jumlah Dokumen Peta Investasi Kota Pontianak	1 Dokumen	113,242,000	2 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	DPMTKPTSP Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Peta Investasi Kota Pontianak	1 Dokumen	113,242,000	
	1 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	DPMTKPTSP	Jumlah Dokumen Peta Investasi Kota Pontianak	1 Dokumen	113,242,000	1 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	DPMTKPTSP Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Peta Investasi Kota Pontianak	1 Dokumen	113,242,000	
3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		PERSENTASE INFORMASI PENANAMAN MODAL YANG DIDAPATKAN OLEH MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA	100%	39,080,000	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	DPMTKPTSP Kota Pontianak	PERSENTASE INFORMASI PENANAMAN MODAL YANG DIDAPATKAN OLEH MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA	100%	39,080,000	
	1 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Buku Profil Investasi yang disusun	85 Buku	39,080,000	1 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	DPMTKPTSP Kota Pontianak	Jumlah Buku Profil Investasi yang disusun	85 Buku	39,080,000	
	1 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	DPMTKPTSP	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan/diikuti dalam rangka promosi daerah	1 kegiatan	39,080,000	1 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	DPMTKPTSP Kota Pontianak	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan/diikuti dalam rangka promosi daerah	1 kegiatan	39,080,000	

NO.	RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA
4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		PERSENTASE PELAYANAN PERIZINAN, NON PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL YANG SESUAI DENGAN SOP	100%	241,766,000	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	DPMTKPTSP Kota Pontianak	PERSENTASE PELAYANAN PERIZINAN, NON PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL YANG SESUAI DENGAN SOP	100%	241,766,000
	1 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di bidang Penanaman Modal	100%	241,766,000	1 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	DPMTKPTSP Kota Pontianak	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di bidang Penanaman Modal	100%	241,766,000
	1 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	DPMTKPTSP	Jumlah Berkas Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Yang Masuk	1100 Berkas	26,101,800	1 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	DPMTKPTSP Kota Pontianak	Jumlah Berkas Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Yang Masuk	1100 Berkas	26,101,800
	2 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	DPMTKPTSP	Jumlah Koordinasi Penerbitan pelayanan perizinan dan Non Perizinan	190 Perusahaan / Berkas	196,567,000	2 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	DPMTKPTSP Kota Pontianak	Jumlah Koordinasi Penerbitan pelayanan perizinan dan Non Perizinan	190 Perusahaan / Berkas	196,567,000
	3 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	DPMTKPTSP	Jumlah Permasalahan yang Difasilitasi	5 Pengaduan	9,640,000	3 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	DPMTKPTSP Kota Pontianak	Jumlah Permasalahan yang Difasilitasi	5 Pengaduan	9,640,000
	4 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	DPMTKPTSP	Jumlah Piutang Retribusia yang Ditagih	Rp2,579,263,180	9,457,200	4 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	DPMTKPTSP Kota Pontianak	Jumlah Piutang Retribusia yang Ditagih	Rp2,579,263,180	9,457,200
5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		PERSENTASE PERUSAHAAN PMA/PMDN YANG MELAPORKAN INVESTASI PENANAMAN MODAL SESUAI SOP	100%	355,607,800	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	DPMTKPTSP Kota Pontianak	PERSENTASE PERUSAHAAN PMA/PMDN YANG MELAPORKAN INVESTASI PENANAMAN MODAL SESUAI SOP	100%	355,607,800
	1 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kegiatan pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kota	100%	355,607,800	1 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	DPMTKPTSP Kota Pontianak	Jumlah kegiatan pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kota	100%	355,607,800
	1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Wilayah Kota Pontianak	Terlaksananya Pemantauan kegiatan pelaksanaan penanaman modal	12 Bulan	50,642,000	1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	DPMTKPTSP Kota Pontianak	Terlaksananya Pemantauan kegiatan pelaksanaan penanaman modal	12 Bulan	50,642,000
	2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Wilayah Kota Pontianak	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis / Sosialisasi kemudahan berusaha	240 Peserta	188,912,500	2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	DPMTKPTSP Kota Pontianak	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis / Sosialisasi kemudahan berusaha	240 Peserta	188,912,500
	3 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Wilayah Kota Pontianak	Terlaksananya Pengawasan kegiatan penanaman modal	69 Kali	116,053,300	3 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	DPMTKPTSP Kota Pontianak	Terlaksananya Pengawasan kegiatan penanaman modal	69 Kali	116,053,300

CATATAN PENTING
12

NO.	RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		PERSENTASE SISTEM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK YANG TERINTEGRASI	100%	126,036,000	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	DPMTKPTSP Kota Pontianak	PERSENTASE SISTEM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK YANG TERINTEGRASI	100%	126,036,000
1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi	100%	126,036,000	1 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DPMTKPTSP Kota Pontianak	Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi	100%	126,036,000
	1 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	DPMTKPTSP	Jumlah Laporan Data Peningkatan Sistem pelayanan Perizinan dan Non perizinan berusaha yang terintegrasi	12 Bulan	126,036,000	1 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	DPMTKPTSP Kota Pontianak	Jumlah Laporan Data Peningkatan Sistem pelayanan Perizinan dan Non perizinan berusaha yang terintegrasi	12 Bulan	126,036,000

REF!

CATATAN PENTING
12

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pontianak
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.07.0.00.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA

Sub Unit Organisasi : 2.07.0.00.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
2	07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA										4,209,325,000		4,335,561,224				
2	07	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										3,283,118,400		3,381,869,924			
2	07	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										27,025,600		27,836,368		
2	07	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan		100 %	12 Bulan	100 %	19,304,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Tingkat Kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	100 %	19,883,120
2	07	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Tingkat Kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan		100 %	4 Laporan	100 %	3,860,800	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Tingkat Kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	100 %	3,976,624
2	07	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan		100 %	4 Laporan	100 %	3,860,800	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Tingkat Kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	100 %	3,976,624
2	07	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										2,661,829,800		2,741,684,700		
2	07	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Tingkat Kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	Jangka Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan		100 %	12 Bulan	100 %	2,341,800,800	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Tingkat Kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	100 %	2,412,054,800
2	07	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Tingkat Kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	Jangka Waktu Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi SKPD	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan		100 %	12 Bulan	100 %	316,574,600	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Tingkat Kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	100 %	326,071,800
2	07	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase Tingkat Kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	Jangka Waktu Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan		100 %	4 Laporan	100 %	3,454,400	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Tingkat Kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	100 %	3,558,100
2	07	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										78,999,100		81,369,100		
2	07	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Tingkat Kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan		100 %	69 Stel	100 %	41,400,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Tingkat Kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	100 %	42,642,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pontianak
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.07.0.00.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA

Sub Unit Organisasi : 2.07.0.00.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
2 07 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Tingkat Kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat Formal	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan		100 %	10 ASN	100 %		37,599,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tingkat Kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	100 %	38,727,100
2 07 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								198,754,800						204,904,756
2 07 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Tingkat Kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	Jangka Waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik, Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan		100 %	12 Bulan	100 %		2,874,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tingkat Kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	100 %	3,160,700
2 07 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Tingkat Kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah Unit Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan		100 %	12 Unit	100 %		14,935,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tingkat Kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	100 %	15,383,256
2 07 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Tingkat Kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah Unit Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan		100 %	511 Unit	100 %		44,902,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tingkat Kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	100 %	46,249,700
2 07 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Tingkat Kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	Jangka Waktu Penyediaan Bahan Logistik	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan		100 %	12 Bulan	100 %		66,649,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tingkat Kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	100 %	68,649,100
2 07 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Tingkat Kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	Jangka Waktu Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan		100 %	12 Bulan	100 %		25,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tingkat Kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	100 %	26,162,000
2 07 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Tingkat Kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	Jangka Waktu Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan		100 %	12 Bulan	100 %		5,547,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tingkat Kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	100 %	5,700,000
2 07 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Tingkat Kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	Jangka Waktu Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan		100 %	12 Bulan	100 %		38,445,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tingkat Kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	100 %	39,600,000
2 07 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								141,065,500						145,298,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pontianak
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.07.0.00.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA

Sub Unit Organisasi : 2.07.0.00.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2.07.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Persentase Tingkat Kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah Unit Pengadaan Mebel	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan		100 %	13 Unit	100 %	95,685,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tingkat Kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	100 %	98,556,000
2.07.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Tingkat Kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana pendukung kantor atau bangunan lainnya	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan		100 %	12 Bulan	100 %	45,379,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tingkat Kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	100 %	46,742,000
2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								154,004,300					158,655,000
2.07.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Tingkat Kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	Jangka Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan		100 %	12 Bulan	100 %	2,336,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tingkat Kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	100 %	2,410,000
2.07.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Tingkat Kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	Jangka Waktu Penyediaan Jasa Layanan Internet, Telpon, air dan Listrik	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan		100 %	12 Bulan	100 %	80,508,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tingkat Kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	100 %	82,950,000
2.07.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Tingkat Kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	Jangka Waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan		100 %	12 Bulan	100 %	71,159,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tingkat Kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	100 %	73,295,000
2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								21,439,300					22,122,000
2.07.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Persentase Tingkat Kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah Mebel yang dipelihara	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan		100 %	4 Unit	100 %	2,540,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tingkat Kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	100 %	2,616,200
2.07.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Tingkat Kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan		100 %	12 Bulan	100 %	17,068,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tingkat Kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	100 %	17,580,800
2.07.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Tingkat Kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan		100 %	1 Gedung	100 %	1,830,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tingkat Kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	100 %	1,925,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pontianak
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.07.0.00.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA

Sub Unit Organisasi : 2.07.0.00.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 07 04 2.03 03	Job Fair/Bursa Kerja	Persentase peningkatan pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui Job fair	Jumlah Lowongan Kerja yang terdaftar	Terlaksananya pengelolaan informasi pasar kerja		100 %	1100 Lowongan	100 %	157,890,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui Job fair	100 %	162,627,700
2 07 05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL								278,453,600					286,505,500
2 07 05 2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								71,536,000					73,681,500
2 07 05 2.01 01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Persentase tenaga kerja yang dilindungi sesuai dengan peraturan yang berlaku	Tingkat Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pekerja dan Pengusaha	Persentase tenaga kerja yang dilindungi sesuai dengan pertauran yang berlaku		100 %	4 Kali	100 %	29,079,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase tenaga kerja yang dilindungi sesuai dengan peraturan yang berlaku	100 %	29,951,500
2 07 05 2.01 03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Persentase tenaga kerja yang dilindungi sesuai dengan peraturan yang berlaku	Persentase Peningkatan Kepesertaan dan Perlindungan Kesejahteraan Bagi Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang dilindungi sesuai dengan pertauran yang berlaku		100 %	100 %	100 %	42,456,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase tenaga kerja yang dilindungi sesuai dengan peraturan yang berlaku	100 %	43,730,000
2 07 05 2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota								206,917,600					212,824,000
2 07 05 2.02 01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kerja yang dilindungi sesuai dengan peraturan yang berlaku	Jumlah Peserta Sosialisasi Hubungan Industrial yang Harmonis	Terlaksananya pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di Kota Pontianak		100 %	90 Perusahaan	100 %	43,727,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase tenaga kerja yang dilindungi sesuai dengan peraturan yang berlaku	100 %	45,039,500
2 07 05 2.02 02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kerja yang dilindungi sesuai dengan peraturan yang berlaku	Penyelesaian Hubungan Industrial	Terlaksananya pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di Kota Pontianak		100 %	50 Kasus	100 %	70,358,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase tenaga kerja yang dilindungi sesuai dengan peraturan yang berlaku	100 %	72,468,500
2 07 05 2.02 04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kerja yang dilindungi sesuai dengan peraturan yang berlaku	Terlaksananya Pembahasan Upah Minimum Kota Pontianak	Terlaksananya pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di Kota Pontianak		100 %	9 Kali	100 %	92,831,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase tenaga kerja yang dilindungi sesuai dengan peraturan yang berlaku	100 %	95,316,000
TOTAL									4,209,325,000					4,335,561,224